



Muhammad Subandi, Dina Suryawati, Ida Ayu Putu Sri Widnyani,
Aini, Mulyati, Herdi Wisman Jaya, Abul Haris Suryo Negoro,
Musmuliadi, Helin Garlinia Yudawisastra, Wenang Hidayatulloh

MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Muhammad Subandi, Dina Suryawati, Ida Ayu Putu Sri Widnyani,
Aini, Mulyati, Herdi Wisman Jaya, Abul Haris Suryo Negoro,
Musmuliadi, Helin Garlinia Yudawisastra, Wenang Hidayatulloh

MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tim Penulis:

**Muhammad Subandi, Dina Suryawati, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Aini,
Mulyati, Herdi Wisman Jaya, Abul Haris Suryo Negoro, Musmuliadi,
Helin Garlinia Yudawisastra, Wenang Hidayatulloh**

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-080-1

Cetakan Pertama:

Juli, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Administrasi pembangunan merupakan cabang ilmu yang terus berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan pembangunan nasional dan global. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, efektivitas administrasi pembangunan menjadi penentu utama keberhasilan program-program pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep, prinsip, hingga praktik manajemen administrasi pembangunan menjadi suatu keniscayaan bagi para pelaku pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat luas yang berkecimpung dalam dunia pembangunan.

Buku *Manajemen Administrasi Pembangunan* ini disusun untuk memberikan landasan teoritis dan praktis mengenai bagaimana administrasi pembangunan dirancang, dijalankan, dan dievaluasi dalam berbagai dimensi. Melalui dua belas bab yang sistematis, pembaca akan diajak memahami mulai dari pengenalan dasar hingga isu-isu kontemporer seperti digitalisasi, kebijakan publik, lingkungan hidup, hingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bab demi bab dalam buku ini membahas secara mendalam tema-tema krusial seperti prinsip-prinsip dasar manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan, manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya, hingga peran teknologi dan inovasi. Setiap bab ditutup dengan rangkuman materi yang dirancang untuk mempermudah pemahaman dan penguatan konsep bagi pembaca.

Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif dan relevan bagi siapa pun yang ingin memahami atau terlibat dalam administrasi pembangunan secara lebih sistematis dan strategis, baik dalam lingkup akademik, pemerintahan, maupun lembaga non-pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGENALAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Definisi Administrasi Pembangunan	2
C. Sejarah dan Perkembangan Administrasi Pembangunan	5
D. Tujuan dan Manfaat Administrasi Pembangunan	9
E. Konteks Administrasi Pembangunan di Indonesia	11
F. Peran Administrasi Pembangunan Dalam Pembangunan Nasional	16
G. Rangkuman Materi	22
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP DASAR MANAJEMEN PEMBANGUNAN	27
A. Konsep Dasar Manajemen Pembangunan	28
B. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi	31
C. Prinsip Keterpaduan dan Keterkaitan	32
D. Prinsip Partisipasi dan Transparansi	34
E. Prinsip Akuntabilitas dan Responsibilitas	38
F. Prinsip Keberlanjutan Dalam Manajemen Pembangunan	42
G. Rangkuman Materi	45
BAB 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	49
A. Pendahuluan	50
B. Konsep Perencanaan Pembangunan	50
C. Tahapan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan	51
D. Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan	53
E. Instrumen Perencanaan Pembangunan	55
F. Indikator Kinerja	56
G. Tantangan Dalam Perencanaan Pembangunan	57
H. Rangkuman Materi	62
BAB 4 ORGANISASI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	65
A. Pendahuluan	66
B. Struktur Organisasi Dalam Pembangunan	67
C. Fungsi dan Tugas Organisasi Pembangunan	68

D. Koordinasi Antardaerah.....	70
E. Kelembagaan Dalam Administrasi Pembangunan	72
F. Desain Organisasi Yang Efektif Dalam Pembangunan	74
G. Rangkuman Materi	76
BAB 5 MANAJEMEN KEUANGAN PEMBANGUNAN	81
A. Pendahuluan	82
B. Konsep Manajemen Keuangan Pembangunan	83
C. Sumber Pembiayaan Pembangunan	85
D. Penyusunan Anggaran Pembangunan.....	87
E. Pengelolaan Anggaran dan Pengendalian Keuangan	99
F. Sistem Pengawasan Keuangan Dalam Pembangunan.....	90
G. Masalah dan Tantangan Dalam Manajemen Keuangan Pembangunan	92
H. Rangkuman Materi	99
BAB 6 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN	103
A. Pendahuluan.....	104
B. Peran Sumber Daya Manajemen Dalam Pembangunan	106
C. Proses Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manajemen	107
D. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manajemen...	109
E. Manajemen Kinerja Sumber Daya Manajemen Dalam Pembangunan	111
F. Isu dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manajemen	113
G. Rangkuman Materi	115
BAB 7 MANAJEMEN PROYEK PEMBANGUNAN	121
A. Pendahuluan	122
B. Definisi dan Konsep Manajemen Proyek Pembangunan	123
C. Tahapan Dalam Manajemen Proyek Pembangunan	126
D. Teknik dan Metode Dalam Manajemen Proyek	131
E. Pengelolaan Waktu, Biaya, dan Kualitas Dalam Proyek	136
F. Evaluasi dan Pengendalian Proyek Pembangunan	140
G. Rangkuman Materi	144

BAB 8 KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	149
A. Pengertian Kebijakan Publik	150
B. Proses Penyusunan Kebijakan Publik	152
C. Hubungan Antara Kebijakan Publik dan Administrasi Pembangunan	154
D. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan	157
E. Evaluasi Dampak Kebijakan Publik Pada Pembangunan	160
F. Rangkuman Materi	162
BAB 9 PENGENALAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	167
A. Pendahuluan	168
B. Peran Teknologi Dalam Pembangunan	168
C. Inovasi Dalam Proses Administrasi Pembangunan	170
D. Pemanfaatan Teknologi Untuk Efisiensi Administrasi	172
E. Digitalisasi Dalam Manajemen Pembangunan	172
F. Tantangan dan Peluang Teknologi Dalam Pembangunan	173
G. Contoh Studi Kasus Implementasi E-Government di Kota Samarinda	173
H. Rangkuman Materi	174
BAB 10 MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN	177
A. Konsep Manajemen Lingkungan Dalam Pembangunan	178
B. Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Dalam Pembangunan	180
C. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam	181
D. Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan	183
E. Kebijakan dan Regulasi Lingkungan dan Pembangunan	185
F. Rangkuman Materi	188
BAB 11 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI	193
A. Pendahuluan	194
B. Pengertian Pembangunan Sosial dan Ekonomi	194
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Sosial dan Ekonomi	198
D. Peran Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembangunan	202
E. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan	207
F. Integrasi Pembangunan Sosial dan Ekonomi Dalam Kebijakan Pembangunan	211

G. Rangkuman Materi	215
BAB 12 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	219
A. Pendahuluan	220
B. Pengertian Partisipasi Masyarakat	221
C. Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat	223
D. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	228
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	231
F. Evaluasi dan Pengaruh Partisipasi Terhadap Keberhasilan Pembangunan	234
G. Rangkuman Materi	236
GLOSARIUM	241
PROFIL PENULIS	263



MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 1: PENGENALAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

BAB 1

PENGENALAN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Administrasi pembangunan merupakan suatu disiplin yang penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang semakin kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana dalam pelaksanaan pembangunan. Administrasi pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi proses pembangunan. Dalam jurnal ini, kita akan membahas berbagai aspek dari administrasi pembangunan, mulai dari definisi, sejarah, tujuan, konteks di Indonesia, hingga perannya dalam pembangunan Nasional.

B. DEFINISI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai proses pengorganisasian, pengelolaan, dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut World Bank (2020), administrasi pembangunan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Salah satu aspek penting dari administrasi pembangunan adalah perencanaan yang efektif. Dalam konteks ini, perencanaan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat agar dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan strategi yang

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Laporan Tingkat Pengangguran Terbuka 2022. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Data Statistik Kalimantan Timur. Jakarta: BPS.
- Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. London: Intermediate Technology Publications.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). Laporan Program Dana Desa. Jakarta: Kementerian Desa.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). Laporan Pembangunan Infrastruktur 2022. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). Ten steps to a result-based monitoring and evaluation system. Washington, D.C.: World Bank.
- McKinsey & Company. (2020). How digital government can improve public services. New York: McKinsey.
- Rukmana, D. (2018). Administrasi publik dan pembangunan. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukirno, S. (2020). Ekonomi pembangunan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development. Boston: Pearson.
- Transparency International. (2021). Indeks persepsi korupsi 2021. Diakses dari [https://www.transparency.org] (<https://www.transparency.org>).
- Transparency International. (2022). Corruption perceptions index 2022. Berlin: Transparency International. Diakses dari [https://www.transparency.org] (<https://www.transparency.org>).
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. New York: United Nations.
- UNDP. (2021). Human development report 2021. New York: UNDP.
- World Bank. (2020). World development report 2020: Data for better lives. Washington, D.C.: World Bank.

- World Bank. (2021). Poverty and shared prosperity 2021: Reversals of fortune. Washington, D.C.: World Bank. Diakses dari [https://www.worldbank.org] (<https://www.worldbank.org>).
- World Economic Forum. (2022). Global gender gap report 2022. Geneva: World Economic Forum.
- IPCC. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press.



MANAJEMEN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 2: PRINSIP-PRINSIP DASAR MANAJEMEN PEMBANGUNAN

Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP

Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP DASAR MANAJEMEN PEMBANGUNAN

A. KONSEP DASAR MANAJEMEN PEMBANGUNAN

Secara umum, manajemen pembangunan dapat dipahami sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Manajemen pembangunan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga strategis dan politis karena melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan konteks kebijakan. Gant (2001) mendefinisikan manajemen pembangunan sebagai *a strategic and systematic process that seeks to manage development efforts by aligning resources, policies, and institutional mechanisms to realize developmental goals effectively*. Sementara itu, Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa manajemen pembangunan merupakan suatu proses yang melibatkan siklus kebijakan publik mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga evaluasi dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, manajemen pembangunan merupakan kombinasi antara ilmu manajemen, kebijakan publik, dan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes) dan dampak (impacts) yang nyata bagi masyarakat.

1. Tujuan dan Fungsi Manajemen Pembangunan

Manajemen pembangunan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berlangsung secara terarah, efektif, efisien, partisipatif, dan berkelanjutan (Todaro, 2020). Secara lebih spesifik, tujuan manajemen pembangunan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pembangunan yang terencana dan berorientasi pada hasil (*result-based development*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi pembangunan: Teori dan praktik.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. World Development, 8(3), 213–235.
- Dadang Solihin, S. E. (2021). *Administrasi Pembangunan*. Jakad Media Publishing
- Gant, R. (2001). *Development Management: Theory and Practice*. London: Routledge.
- Grindle, M. S. (2007). *Good Enough Governance Revisited*. Development Policy Review, 25(5), 553–574.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik: Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Andi.
- Meadows, D. H. (1999). *Leverage Points: Places to Intervene in a System*. Sustainability Institute.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*. Elex Media Komputindo



MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 3: PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP.

Universitas Ngurah Rai

BAB 3

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Bab III Perencanaan Pembangunan merupakan bagian dari manajemen administrasi Pembangunan. Bab ini mengulas secara singkat tentang konsep perencanaan Pembangunan, tahapan dalam proses perencanaan Pembangunan, jenis-jenis perencanaan Pembangunan, instrument perencanaan Pembangunan, indikator kinerja dan tantangan serta strategi menghadapi tantangan dalam perencanaan Pembangunan. Bab ini disertai pula dengan evaluasi berupa tugas essay yang bersifat kontekstual.

B. KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses sistematis dalam menentukan tujuan pembangunan, merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapainya, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Conyers dan Hills (1994), "Perencanaan pembangunan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah untuk memengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perubahan dalam masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mengandung unsur politis, sosial, dan ekonomi. Ini berarti perencanaan harus memperhitungkan dinamika kekuasaan, partisipasi masyarakat, kondisi ekonomi, serta potensi lingkungan. Menurut Friedmann (1987): *"Planning is a process of social guidance. It is intended to direct society toward collectively desired goals, using the best available knowledge"*. Dalam konteks Indonesia, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mendefinisikan perencanaan sebagai: "Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). RPJMN 2020–2024: Indonesia Maju.
- Conyers, D., & Hills, P. (1994). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. Wiley.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press.
- Mustopadidjaja Ar, dkk, editor (2012). Bappenas dalam Sejarah perencanaan Pembangunan Indonesia. Jakarta, LP3ES.
- Solichin, Dadang (2008). Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan (Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah di Bali Tanggal 26 April 2008). Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (dalam Sjafrizal, 2014).
- Sjafrizal (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.



MANAJEMEN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 4: ORGANISASI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dr. Aini, S.Sos., M.Si

Universitas Kutai Kartanegara

BAB 4

ORGANISASI DALAM

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan proses dinamis yang membutuhkan sistem administrasi yang tertata dengan baik agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, organisasi memegang peran sentral sebagai pengelola, pelaksana, sekaligus pengendali kebijakan dan program pembangunan (Dwiyanto, 2006) Struktur organisasi, fungsi kelembagaan, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan menjadi elemen penting dalam administrasi pembangunan agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara umum, organisasi dalam administrasi pembangunan terdiri dari lembaga-lembaga perencana seperti Bappenas di tingkat pusat dan Bappeda di tingkat daerah, serta kementerian teknis dan dinas sektoral yang menjalankan implementasi pembangunan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, organisasi-organisasi ini juga dituntut untuk lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, berbagai tantangan masih muncul, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di beberapa daerah (Dwiyanto, 2006).

Instruksi khusus dalam pembahasan materi ini mencakup analisis mengenai struktur organisasi, fungsi dan tugas utama organisasi pembangunan, koordinasi antardaerah, hingga desain organisasi yang efektif untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Aspek kelembagaan juga menjadi fokus penting karena menyangkut sistem norma, aturan, dan tata kelola yang membingkai proses pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun 2024*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemendagri.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change, and economic performance*. Cambridge University Press.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2004). *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. Oxford University Press.
- UNDP. (2009). *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results*. UNDP Evaluation Office.



MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 5: MANAJEMEN KEUANGAN PEMBANGUNAN

Mulyati, S.E.

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

BAB 5

MANAJEMEN KEUANGAN PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan fondasi keuangan yang kokoh, transparan, dan efisien. Dalam konteks administrasi pembangunan, manajemen keuangan memegang peranan sentral dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan serta pencapaian tujuan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Manajemen keuangan pembangunan mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengelolaan dan pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian keuangan. Proses ini menjadi vital karena sumber daya keuangan merupakan faktor pembatas yang harus dioptimalkan penggunaannya untuk menghasilkan dampak pembangunan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Instruksi khusus dalam bab ini menekankan pada pentingnya integrasi antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, topik-topik utama yang akan dibahas mencakup: berbagai sumber pembiayaan pembangunan, mekanisme penyusunan anggaran yang berbasis partisipatif dan berbasis data, strategi pengelolaan dan pengendalian anggaran, sistem pengawasan keuangan yang adaptif terhadap teknologi informasi, serta tantangan-tantangan aktual yang dihadapi dalam manajemen keuangan pembangunan, termasuk aspek risiko ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan fiskal.

Berbagai data aktual memperkuat urgensi pembahasan ini. Pemerintah Indonesia, misalnya, mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp417 triliun pada tahun 2020 dari kombinasi dana APBN, investasi swasta, dan pinjaman luar negeri (Kementerian Keuangan, 2021). Sementara itu, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2022). Economic outlook: Asia and the Pacific. ADB.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). Laporan investasi 2021. Jakarta: BKPM.
- Badan Pengatur Jalan Tol. (2022). Laporan kinerja proyek jalan tol. Jakarta: BPJT.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). Laporan hasil pemeriksaan 2021. Jakarta: BPK.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). Laporan evaluasi penggunaan anggaran. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Laporan tahunan BPKP 2021. Jakarta: BPKP.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Laporan tahunan Bappenas. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik pembangunan Indonesia 2020. Jakarta: BPS.
- Baiocchi, G. (2005). Participation, activism, and politics: The case of participatory budgeting in Brazil. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bank Dunia. (2020). World development report 2020: Data for better lives. Washington, DC: World Bank.
- Bank Dunia. (2021). World development report: Data for better lives. Washington, DC: World Bank.
- International Monetary Fund. (2020). World economic outlook: A long and difficult ascent. Washington, DC: IMF.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Laporan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). Laporan program dana desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan realisasi anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Evaluasi sistem anggaran berbasis kinerja. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Sari, R. (2023). Pengawasan proyek infrastruktur di Jawa Barat: Studi kasus dan implikasi. Jurnal Pembangunan Wilayah.
- Statista. (2021). Crowdfunding - Statistics & facts. <https://www.statista.com/topics/1550/crowdfunding/>
- Transparency International. (2021). Corruption perceptions index. <https://www.transparency.org/en/cpi>
- UNICEF. (2021). Investing in education: A global perspective. New York: UNICEF.
- United Nations Development Programme. (2019). Sustainable development goals: A global perspective. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme. (2021). Financing the 2030 agenda: Sustainable development goals. New York: UNDP.
- Universitas Gadjah Mada. (2023). Pengaruh teknologi informasi terhadap pengawasan keuangan daerah. Yogyakarta: UGM Press.
- World Bank. (2020). Financing for development: The role of public investment. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2021). Indonesia economic quarterly. Washington, DC: World Bank.
- World Economic Forum. (2020). The future of infrastructure: How to build a sustainable future. Geneva: WEF.



MANAJEMEN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 6: PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN

Dr. Herdi Wisman Jaya, CT.,S.Pd.,M.H

Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten

BAB 6

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Salah satu elemen kunci dalam kesuksesan pembangunan adalah pengelolaan sumber daya manajemen yang efektif dan efisien. Sumber daya manajemen tidak hanya terbatas pada aspek manusia, tetapi juga meliputi waktu, keuangan, informasi, dan teknologi yang dikelola secara strategis. Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan sumber daya manajemen menjadi pilar penting agar program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan berkelanjutan. Sayangnya, di berbagai wilayah, masih ditemukan permasalahan klasik seperti ketidakefisienan birokrasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (M&E).

Pengelolaan sumber daya manajemen yang baik membutuhkan pendekatan berbasis data dan teknologi. Transformasi digital dalam manajemen proyek pembangunan menjadi faktor penentu keberhasilan di era revolusi industri 4.0 ini. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan modern harus mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* dan manajemen strategis (Susanto & Harjanto, 2021). Kegagalan pembangunan seringkali terjadi bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena lemahnya pengelolaan dan koordinasi. Ketika sumber daya tidak diatur dengan baik, akan terjadi pemborosan anggaran, keterlambatan proyek, hingga kegagalan mencapai target pembangunan jangka panjang. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji ulang praktik pengelolaan sumber daya yang ada saat ini.

DAFTAR PSUTAKA

- Susanto, D., & Harjanto, T. (2021). *Strategi Manajemen Pembangunan Berbasis Teknologi Digital*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 12(3), 225–238.
- Putra, A., & Wulandari, S. (2022). *Penguatan Kapasitas Manajerial Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 17(1), 65–78.
- Yuliana, D., Ramli, M., & Pertiwi, R. (2023). *Manajemen Berbasis Hasil dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Manajemen Pembangunan, 8(2), 102–117.
- Hakim, M. A., & Ramadhan, T. (2024). *Transformasi Digital dalam Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan*. Jurnal Inovasi dan Teknologi, 6(1), 51–63.
- Nugroho, H., & Sari, P. (2020). *Efektivitas Manajemen Proyek Pembangunan Infrastruktur Publik di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(4), 300–315.
- Yuliana, D., & Handoko, A. (2021). *Pengaruh Sumber Daya Manajemen terhadap Efektivitas Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Administrasi Pembangunan, 8(1), 45–58.
- Prasetyo, M., & Widodo, S. (2022). *Manajemen Strategis dalam Proyek Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 17(2), 102–114.
- Sutrisno, B. (2020). *Tantangan Manajerial dalam Pembangunan Berbasis Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 10(4), 201–212.
- Lestari, P., & Hidayat, R. (2023). *Penguatan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Nasional*. Jurnal Manajemen dan Inovasi, 6(3), 89–101.
- Baskoro, D., & Anggraeni, T. (2020). *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Manajemen Pembangunan Nasional*. Jurnal Administrasi Negara, 9(1), 55–68.
- Wicaksono, A., & Nuraini, F. (2024). *Inovasi Manajemen Pembangunan dalam Konteks Perubahan Iklim*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1), 33–47.

- Maulana, A., & Astuti, L. (2022). *Peran Strategis Sumber Daya Manajemen dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan*. Jurnal Analisis Kebijakan, 11(3), 120–132.
- Suryani, N., & Nugroho, A. (2020). *Model Pengembangan SDM Manajerial Berbasis Kompetensi di Era Digital*. Jurnal Manajemen Strategis, 12(1), 45–58.
- Hartono, R., & Fitriani, D. (2021). *Pemberdayaan Manajerial untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi Publik*. Jurnal Administrasi Negara, 10(3), 76–89.
- Rahma, U., & Bakhtiar, M. (2022). *Kendala dalam Pemberdayaan SDM Manajemen di Lembaga Pemerintah*. Jurnal Reformasi Birokrasi, 5(2), 60–72.
- Saputra, R., & Lestari, S. (2023). *Strategi Pengembangan Kepemimpinan Manajerial di Sektor Swasta*. Jurnal Manajemen dan Inovasi, 8(1), 30–42.
- Nugraha, E., & Wulandari, T. (2021). *Digitalisasi dan Tantangan Baru dalam Pengembangan Manajemen*. Jurnal Teknologi dan Manajemen, 7(3), 99–112.
- Andini, A., & Rachman, Y. (2022). *Dampak Pemberdayaan Manajer terhadap Motivasi dan Produktivitas Tim*. Jurnal Psikologi Industri, 5(3), 80–92.
- Wahyuni, L., & Ismail, T. (2023). *Peran Kebijakan Organisasi dalam Pemberdayaan SDM Manajerial*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen SDM, 4(2), 66–79.
- Yuliani, D., & Hasan, A. (2020). *Analisis Kompetensi Manajemen dan Implikasinya Terhadap Efektivitas Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(4), 132–145.
- Ridwan, R., & Sari, L. (2021). *Peran Manajemen dalam Mendorong Pembangunan Nasional Berbasis SDM Unggul*. Jurnal Pembangunan dan Inovasi, 6(1), 21–34.
- Andika, R., & Permana, T. (2020). *Peran Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi*. Jurnal Manajemen Bisnis, 11(2), 101–113.

- Suryani, M., & Lestari, D. (2021). *Manajemen Kinerja SDM dan Implikasinya terhadap Pengembangan Organisasi*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 6(1), 55–67.
- Rizky, F., & Haris, Y. (2022). *Pengaruh Sistem Penilaian Kinerja terhadap Pengembangan Manajerial di Sektor Publik*. Jurnal Administrasi Publik, 9(3), 88–99.
- Kurniawan, D., & Febrina, A. (2021). *Penilaian Kinerja Berbasis Kompetensi dan Peningkatan Profesionalisme Manajer*. Jurnal SDM dan Kepemimpinan, 7(1), 33–47.
- Yuliani, D., & Hasan, S. (2020). *Kritik terhadap Sistem Evaluasi Kinerja Tradisional di Organisasi Pemerintah*. Jurnal Reformasi Birokrasi, 5(2), 60–71.
- Setiawan, D., & Lestari, F. (2021). *Tantangan Pengelolaan SDM di Era Dinamis*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 12(1), 50–63.
- Yuliani, R., & Prasetyo, B. (2022). *Kesenjangan Kompetensi dalam Pengelolaan Manajerial*. Jurnal Human Capital, 9(2), 45–58.
- Saragih, M., & Hardiyanti, R. (2020). *Stres Kerja Manajerial dan Tantangan Produktivitas SDM*. Jurnal Psikologi Industri, 6(3), 76–88.
- Nugroho, A., & Rahmawati, D. (2023). *Transformasi Digital dalam Pengelolaan Sumber Daya Manajerial*. Jurnal Teknologi dan Kepemimpinan, 7(1), 29–41.
- Kurniawan, D., & Sari, T. (2021). *Manajemen Lintas Budaya dalam Era Globalisasi*. Jurnal Manajemen Internasional, 5(2), 90–102.
- Fauzan, A., & Malik, H. (2020). *Ketidaksinambungan Strategi SDM dalam Organisasi*. Jurnal Strategi Organisasi, 4(3), 66–77.



MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 7: MANAJEMEN PROYEK PEMBANGUNAN

Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

BAB 7

MANAJEMEN PROYEK PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Manajemen proyek merupakan aspek kritis dalam dunia pembangunan dan bisnis, di mana perubahan cepat dan kompleksitas tugas serta objek proyek sering menjadi tantangan yang signifikan. Dalam konteks ini, manajemen proyek pembangunan berfokus pada pengelolaan sumber daya, baik itu manusia, material, maupun finansial, guna memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*), manajemen proyek melibatkan lima fase inti: inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan (*Project Management Institute*, 2017). Dengan sekitar 70% proyek pembangunan dilaporkan mengalami keterlambatan atau pembengkakan biaya, penting untuk menerapkan manajemen proyek yang efektif guna meminimalkan risiko tersebut (KPMG, 2020).

Materi ini akan membahas definisi dan konsep manajemen proyek pembangunan, tahapan dalam manajemen proyek, teknik dan metode yang digunakan, serta pengelolaan waktu, biaya, dan kualitas dalam proyek. Instruksi khusus terkait materi ini adalah memahami setiap elemen manajemen proyek secara mendalam dan menganalisis pengaruh masing-masing dalam keberhasilan proyek pembangunan.

Sebagai gambaran, saat ini lebih dari 60% proyek konstruksi di Indonesia mengalami pembengkakan biaya, yang sering kali disebabkan oleh pengendalian yang kurang efektif dalam manajemen proyek (BPS, 2021). Oleh karena itu, penting bagi manajer proyek untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam memanfaatkan berbagai teknik dan metode, termasuk Gantt chart, metode Agile, dan pendekatan seperti *Earned Value Management* (EVM), untuk mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa Pura II. (2019). Laporan tahunan 2019.
- Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 11(4), 14-24.
- Bourne, L. (2016). Stakeholder relationship management: A maturity model for organizational implementation.
- Choudhry, R. M., et al. (2019). Cost overrun in construction projects: A case study. Journal of Construction Engineering and Management.
- Crosby, P. B. (1979). Quality is free: The art of making quality certain. New York: McGraw-Hill.
- Fleming, Q. W., & Koppelman, J. (2016). Earned value project management (4th ed.). Project Management Institute.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.
- George, M. L. (2002). The lean six sigma pocket toolbox. New York: McGraw-Hill.
- Hillson, D. (2017). Practical project risk management: The ATOM methodology.
- Hillson, D. (2020). Practical project risk management: The ATOM methodology (3rd ed.). Berrett-Koehler Publishers.
- ISO. (2018). ISO 9001:2015 quality management systems. International Organization for Standardization.
- Juran, J. M. (2010). Juran's quality handbook (6th ed.). McGraw-Hill.
- Kerzner, H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12th ed.). Wiley.
- Kementerian PUPR. (2020). Laporan proyek infrastruktur 2020.
- KPMG. (2020). Project management survey report.
- KPMG International. (2020). Project management survey.
- Khamooshi, S., et al. (2019). The role of earned value management in project success.
- McKinsey & Company. (2017). Reinventing construction: A route to higher productivity. McKinsey Global Institute.

McKinsey & Company. (2018). The construction productivity imperative.

Moder, J. J., Phillips, C. R., & Davis, E. W. (1983). Project management with PERT/CPM. Van Nostrand Reinhold.

Morris, P. W. G., & Pinto, J. K. (2010). The Wiley guide to project technology, supply chain, and procurement management.

PMI. (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide).

PMI. (2018). Pulse of the profession.

PMI. (2019). Pulse of the profession 2019.

PMI. (2020). Pulse of the profession.

PMI. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7th ed.). PMI.

Schmidt, W., & Frey, M. (2019). Project management in practice. Springer.

Standish Group. (2015). Chaos report. Standish Group International, Inc.

Standish Group. (2018). CHAOS report. Standish Group International.

Turner, J. R. (2018). The handbook of project-based management (4th ed.). McGraw-Hill.

Turner, J. R. (2019). Gower handbook of project management. Gower Publishing.

United Nations. (2020). Sustainable development goals report.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). Global environment outlook. UNEP.

VersionOne. (2020). State of agile report..



MANAJEMEN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 8: KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M.Si

FISIP Universitas Jember

BAB 8

KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan inti dari fungsi pemerintahan dalam negara modern. Ia tidak sekadar kumpulan keputusan administratif, melainkan suatu proses multidimensi yang mencerminkan upaya negara dalam merespons kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi publik secara terstruktur dan berkelanjutan. Kebijakan publik hadir sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan bersama (*collective goals*) masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dirancang oleh pemerintah serta aktor-aktor terkait lainnya.

Secara konseptual, kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor-aktor negara, baik secara langsung maupun melalui kolaborasi dengan sektor non-negara, guna menyelesaikan isu-isu yang berdampak luas terhadap kehidupan warga negara (Dye, 2017; Birkland, 2019). Dalam hal ini, kebijakan publik tidak hanya sekadar respons terhadap masalah yang ada, tetapi juga merupakan sarana untuk membentuk masa depan masyarakat melalui perencanaan strategis yang melibatkan dimensi politik, administratif, ekonomi, dan sosial.

Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2020), kebijakan publik adalah suatu sistem keputusan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika aktor (pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta), ide (nilai-nilai, norma, ideologi), dan institusi (struktur hukum, aturan main, dan prosedur administratif). Oleh karena itu, kebijakan publik merupakan hasil dari proses interaktif dan adaptif yang terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2018). *Public policymaking* (9th ed.). Cengage Learning.
- Bamberger, M., Rugh, J., & Mabry, L. (2012). *RealWorld evaluation: Working under budget, time, data, and political constraints*. SAGE Publications.
- Birkland, T. A. (2019). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (4th ed.). Routledge.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Cairney, P. (2020). *Understanding public policy: Theories and issues*. Red Globe Press.
- Chelimskey, E. (2006). The purposes of evaluation in a democratic society. In I. Shaw, J. C. Greene, & M. M. Mark (Eds.), *The SAGE handbook of evaluation* (pp. 33–55). SAGE Publications.
- DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). What ever happened to policy implementation? An alternative approach. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 12(4), 467–492. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003544>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Elmore, R. F. (1980). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616. <https://doi.org/10.2307/2149621>
- Fischer, F. (2003). *Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices*. Oxford University Press.
- Fitz-Gibbon, C. T., & Morris, L. L. (1996). *How to design a program evaluation*. SAGE Publications.
- Grin, J., Rotmans, J., & Schot, J. (2010). *Transitions to sustainable development: New directions in the study of long term transformative change*. Routledge.

- Heikkilä, T., & Cairney, P. (2017). Comparison of theories of the policy process. In C. M. Weible & P. A. Sabatier (Eds.), *Theories of the policy process* (4th ed., pp. 301–328). Westview Press.
- Hill, M. (2016). *The public policy process* (6th ed.). Routledge.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hill, M., & Varone, F. (2017). *The public policy process* (7th ed.). Routledge.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (2020). *Policy analysis for the real world*. Oxford University Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2019). Theories of the policy cycle. In F. Fischer, G. Miller, & M. Sidney (Eds.), *Handbook of public policy analysis* (pp. 43–62). CRC Press.
- John, P. (2018). *How far to nudge? Assessing behavioural public policy*. Edward Elgar.
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (Updated 2nd ed.). Pearson Education.
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). *Implementation and public policy*. University Press of America.
- OECD. (2020). *Strengthening the impact of public policies through evaluation*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- O'Toole, L. J. (2017). The theory and practice of policy implementation in a multi-actor setting. *Public Administration Review*, 77(1), 45–56. <https://doi.org/10.1111/puar.12698>
- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar.
- Parsons, W. (2020). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis* (Rev. ed.). Edward Elgar Publishing.

- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
- Rogers, P. J., & Williams, B. (2008). Evaluation for practice improvement and organizational learning. *American Journal of Evaluation*, 29(4), 527–542. <https://doi.org/10.1177/1098214008325150>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). SAGE Publications.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2018). *Theories of the policy process* (4th ed.). Westview Press.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). SAGE Publications.
- UNESCAP. (2021). *What is good governance?* United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. <https://www.unescap.org/resources/what-good-governance>
- Vedung, E. (2017). *Public policy and program evaluation*. Routledge.
- Walt, G., & Gilson, L. (2014). Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis. *Health Policy and Planning*, 9(4), 353–370. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu024>
- Weiss, C. H. (1999). *Evaluation: Methods for studying programs and policies*. Prentice Hall.



MANAJEMEN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 9: PENGENALAN

TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dr. Musmuliadi. S.Sos., M.Si

Program Pasca Sarjana Universitas Kartanegara Tenggarong

BAB 9

Pengenalan Teknologi dan Inovasi dalam Administrasi Pembangunan

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, administrasi pembangunan menghadapi tantangan dan peluang baru. Teknologi dan inovasi menjadi dua pilar utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses administrasi pembangunan. Menurut Schumpeter (1934), inovasi merupakan kunci dalam menciptakan keuntungan kompetitif, yang sangat relevan dalam konteks administrasi publik. Dalam jurnal ini, kami akan membahas peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi dalam administrasi pembangunan serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

B. PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN

Teknologi telah menjadi pilar penting dalam proses pembangunan dan penyampaian layanan publik yang lebih baik. Dalam era digital saat ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai pengubah paradigma dalam cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi. Salah satu contoh paling mencolok adalah penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dalam perencanaan tata ruang. SIG memungkinkan pemerintah untuk menganalisis dan memvisualisasikan data geografis dengan cara yang sangat mendetail. Dengan informasi yang akurat dan terkini, pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Misalnya, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, SIG dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi lokasi yang strategis, meminimalkan dampak lingkungan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

DAPSTAR PUSTAKA

- Anwar, F. (2021). "Tantangan dan Peluang Inovasi dalam Administrasi Publik di Indonesia." **Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik**, 13(1), 56-72.
- Drucker, P. F. (1985). **Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles**. Harper & Row.
- Hidayat, A. (2019). "Inovasi dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus di Indonesia." **Jurnal Kebijakan Publik**, 6(2), 45-62.
- Prasetyo, E., & Suharto, A. (2020). "Digitalisasi Administrasi Pembangunan di Era Revolusi Industri 4.0." **Jurnal Teknologi dan Inovasi**, 8(1), 23-39.
- Schumpeter, J. A. (1934). **The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle**. Harvard University Press.
- Setiawan, A. (2021). "Transformasi Digital dalam Sektor Publik: Tantangan dan Peluang." **Jurnal Ilmu Administrasi**, 12(2), 89-102.
- World Bank (2016). **World Development Report 2016: Digital Dividends**. World Bank Publications.
- Yusuf, M. (2018). "Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Administrasi di Sektor Publik." **Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan**, 10(1), 12-25.



MANAJEMEN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 10: MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN

Dr. Helin G Yudawisastra, S.E., M.Si

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 10

MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN

A. KONSEP MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk menggabungkan kekhawatiran yang berkembang tentang berbagai masalah lingkungan dengan masalah sosial ekonomi. Ini merupakan hasil dari tumbuhnya kesadaran akan keterkaitan global antara masalah lingkungan yang meningkat, masalah sosial ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan serta kekhawatiran tentang masa depan umat manusia (Yudawisastra, 2021). Pembangunan berkelanjutan memberikan solusi bagi pola pembangunan, sosial dan ekonomi untuk mencegah masalah seperti perusakan sumber daya alam, degradasi sistem biologis, polusi, perubahan iklim, peningkatan populasi yang berlebihan, ketidakadilan dan penurunan kualitas kehidupan baik di masa sekarang dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses menggunakan sumber daya, mengarahkan investasi, pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan (Sharma & Kushwaha, 2015). Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah suatu rencana aksi untuk manusia, planet, dan kesejahteraan. Ekonomi pembangunan merangkum aspek yang terlibat upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara (Iksan et al., 2025). Ada tujuan-tujuan dalam agenda *Sustainable Development Goals* 2030 yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan (Kartawinata et al., 2023).

Manajemen lingkungan dalam pembangunan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Konsep ini menekankan perlunya integrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, R. (2015). Hubungan antara iso 14001, environmental performance dan environmental disclosure terhadap economic performance. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 11(2).
- Burhany, D. I., & Nurniah, N. (2013). Akuntansi manajemen lingkungan, alat bantu untuk meningkatkan kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(3), 279–298.
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 204–218.
- Iksan, A., Sartiyah, S., Setyawati, I., Wattimena, L., Sinurat, J., Puspita, Y., Yudawisastra, H. G., Wicaksono, R. A., Juliansyah, R., Luthfinur, L., & Nugroho, L. (2025). EKONOMI PEMBANGUNAN. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Indarto, K. D., & Rahayu, S. (2015). Dampak pembangunan perumahan terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar di kelurahan sambiroto, kecamatan tembalang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(3), 428–439.
- Kartawinata, B. R., Burhanudin, J., Mulyadi, M., Doho, D. B., Silooy, M., Kemala, S., Sayuti, A. M., Yudawisastra, H. G., & Mulatsih, L. S. (2023). *Filsafat Bisnis*.
- Khaerulyansyah, F., Murtejo, T., & Alimuddin, A. (2018). Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen, Hotel, Dan Area Komersil Olympic City Bogor. *Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil*, 2(2), 87–92.
- Maryanto, M. (2018). Analisis Pengaruh Keterbukaan dan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kerinci Tahun 2017. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 17–21.

- Novianti, N., & Kusuma, W. (2018). Masyarakat Hukum Adat: Hak Atas Pembangunan Berbasis Kesejahteraan. *Literasi Hukum*, 2(2), 13–25.
- Ode Angga, L., Siahaya, N., Martiansyah, I., Fitrinawati, H., Pattiwael, M., Halid, I., Hidana, R., Setya Ratri, W., Sandalayuk, M., Masyrurroh, A., Garlinia Yudawisastra, H., & Wakano, D. (2023). *PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP*. www.penerbitwidina.com
- Qutbi, A. A., & Sarjan, M. (2024). Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Lamda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 4(1), 49–57.
- Septianda, M. F. (2024). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago*, 3(01), 17–27.
- Sharma, N. K., & Kushwaha, G. S. (2015). Emerging Green Market as an Opportunity for Green Entrepreneurs and Sustainable Development in India. *Journal of Entrepreneurship and Organization Management*, 4(2). <https://doi.org/10.4172/2169-026X.1000134>
- Yudawisastra, H. G. (2021). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Ekonomi Pembangunan*, 28.



MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 11: PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

BAB 11

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial dan ekonomi merupakan dua aspek yang saling terkait dalam proses pembangunan suatu negara. Pembangunan sosial mencakup perbaikan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, pembangunan ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan per kapita. Kombinasi yang harmonis antara kedua aspek ini sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Bank Dunia (2021), negara-negara dengan indikator pembangunan sosial yang baik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

B. PENGERTIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

Pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam hal ini, pembangunan sosial tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti kebahagiaan, keadilan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lokal dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pembangunan ekonomi merujuk pada proses peningkatan produksi barang dan jasa yang

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2021). World Development Report 2021: Data for Better Lives. Washington, DC: World Bank.
- International Labour Organization (ILO). (2021). Skills for a Sustainable Future: Skills for a Changing World. Geneva: International Labour Organization.
- Kementerian Sosial. (2020). Laporan Program Keluarga Harapan 2020. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Program bantuan pangan non tunai. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Statistik Pendidikan 2022. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan imunisasi sekolah. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2022). Laporan Investasi Infrastruktur 2022. Jakarta: Kementerian PUPR Republik Indonesia.
- OECD. (2020). Education at a glance. Paris: OECD Publishing.
- Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). (2021). Human Development Report 2021: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today - Inequalities in Human Development in the 21st Century. New York: United Nations Development Programme.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Knopf.



MANAJEMEN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB 12: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Wenang Hidayatulloh, S.P. M.M

Universitas Pancasila

BAB 12

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Pada era modern ini, masyarakat cenderung tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam seluruh tahapan pembangunan. Partisipasi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bab ini akan membahas secara menyeluruh mengenai pengertian partisipasi masyarakat, jenis dan bentuknya, peran strategisnya dalam pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya hingga evaluasi dan dampak nyata terhadap keberhasilan pembangunan. Pembaca diajak untuk memahami bahwa keterlibatan masyarakat bukan hanya pelengkap administratif, tetapi menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan “Indeks Pembangunan Desa 2023”, salah satu indikator kemajuan desa adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Di Indonesia, sekitar 69,2% desa di Indonesia sudah melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah pembangunan desa. Namun hanya 42,5% desa yang memiliki mekanisme evaluasi berbasis partisipasi masyarakat menunjukkan masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam tahap pengawasan dan evaluasi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar formalitas saja, tetapi substansi demi pembangunan yang lebih adil dan berdaya guna.

Penulisan bab ini bertujuan agar pembaca dapat memahami partisipasi masyarakat. Pembaca mampu mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pembaca juga

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2001). Pemberdayaan pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Ara, E., Seddiky, M. A., Basit, A., & Khanam, R. (2024). Enhancing community participation at local development projects in Bangladesh: Experience from Union Parishad Governance Project. *European Scientific Journal (ESJ)*, 28, 218. Retrieved from <https://test.eujournal.org/index.php/esj/article/view/18022>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks pembangunan desa 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Cornell: Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University.
- Dwiningrum, S. I. A. (2015). Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hagang, V. A. A., Idris, A., & Dama, M. (2019). Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Dampar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 519–530.
- Ismanudin. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa (Studi kasus di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu). *Aspirasi*, 11(2), 69–82. Retrieved from <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/76>
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/25447>
- Kinyata, G. S., & Abiodun, N. L. (2020). The impact of community participation on projects success in Africa: A bottom up approach. *International Journal of Research in Sociology and Anthropology*.

- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Jakarta: Erlangga.
- Pandey, P. C. (2024, August). The role of community participation in enhancing the effectiveness of development initiatives. Foundation for Development Initiative. <https://www.developmentinitiatives.org/2024/08/07/the-role-of-community-participation-in-enhancing-the-effectiveness-of-development-initiatives/>
- Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, 3(1). <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.180>
- Purwandari, A. W., & Mussadun, M. (2016). Perencanaan pembangunan kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 11(4), 377–390. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11548>
- Sigalingging, A. H., & Warjio, W. (2014). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Studi kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 4(2), 116–145. <https://doi.org/10.31289/jap.v4i2.1383>
- Slamet. (2003). Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sustainability Directory. (2025, January). How does community involvement impact outcomes? Sustainability Directory. <https://sustainability-directory.com/question/how-does-community-involvement-impact-outcomes/>



PROFIL PENULIS

Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.



Penulis adalah dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong. Fokus kajiannya meliputi administrasi pembangunan, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan. Sebagai pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan, Ekonomi Publik, dan Metode Penelitian Kualitatif, dengan fokus pada kebijakan pembangunan, tata kelola sektor publik, serta pendekatan penelitian sosial yang berbasis kualitatif. Keahliannya mencakup analisis kebijakan publik, manajemen pembangunan daerah, serta evaluasi program kebijakan pemerintah. Selain mengajar, beliau aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan publik. Beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, Penulis berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta mendukung terciptanya kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP



Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Kepakarannya terletak pada bidang kebijakan publik dan pemerintahan daerah, dengan fokus pada perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di tingkat lokal. Ia aktif meneliti isu-isu strategis seperti inovasi kebijakan, tata kelola pemerintahan adaptif, serta sinergi antarlevel pemerintahan dalam pembangunan daerah. Artikel-artikelnya telah dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi nasional dan internasional.

Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP.



Penulis lahir di Badung-Bali, 29 Juni. Setelah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Administrasi Negara FISIP UNWAR tahun 1997, Pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Di Pascasarjana Universitas Ngurah Rai tahun 2011 dan Pada Tahun 2015 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi dengan kekhususan Administrasi Publik di FIA Universitas Brawijaya-Malang. Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sebagai Dosen dpk LLDIKTI Wilayah VIII di S1 & S2 Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai, saat ini sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Ngurah Rai-Denpasar. Pernah sebagai Komisioner KPU Kabupaten Badung, Sebagai Ketua DPD IAPA (*Indonesian Association for Public Administration*) Bali Nusra dan sebagai Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Badung sampai dengan sekarang. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan dan publikasi di beberapa jurnal ilmiah, prosiding nasional dan internasional tentang Kepemiluan, Perencanaan Pembangunan, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik. Buku yang pernah diterbitkan “Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua”, “Perilaku dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif, termasuk menulis di book chapter termasuk sebagai editor”. Aktif sebagai narasumber dalam forum ilmiah, narasumber bimbingan teknis DPRD, Tim Juri Lomba karya Tulis, Panelis Debat Publik Pilkada, Moderator, Tim Perumus, Sebagai Tim Advokasi Pengelolaan SP4N LAPOR! Di Provinsi Bali tahun 2021 s/d 2023, Sebagai Pendamping Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Bali tahun 2021, Pandu Digital Bacth Merah, sebagai reviewer di beberapa jurnal ilmiah lokal dan nasional, Konsultan Nasional Penyusunan Evaluasi Kebijakan SP4N LAPOR! Sampai saat ini sebagai Konsultan Kebijakan Publik, sebagai Asesor Analisis Kebijakan Publik. Email: dayusriwid@gmail.com/ dayusriwid@unr.ac.id

Dr. Aini, S.Sos.,M.Si



Penulis adalah dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Minat risetnya Organisasi dalam Administrasi Pembangunan. Sebagai pengampu mata kuliah Kebijakan Publik dan Manajemen dan Kebijakan Keuangan Daerah, beliau aktif dalam mengajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Fakultas Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Anti Korupsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Filsafat Logika di Fakultas Hukum. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan 1. Organisasi yayasan jantung sehat indonesia, 2. Persatuan Olahraga Wanita 3. Ikatan Penatu Personalia Indonesia dan 4. ASBI. Dengan pengalaman keorganisasian dan keahlian yang dimiliki, penulis berkontribusi dan mendukung dalam pengembangan Organisasi dan Administrasi Pembangunan.

Mulyati, S.E.



Penulis adalah seorang akademisi yang sedang menempuh pendidikan di Program Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sejak tahun 2024 dan hingga diterbitkannya buku ini telah berada di semester 2. Dalam perannya sebagai mahasiswa pascasarjana, Penulis berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam manajemen, salah satunya pada manajemen keuangan pembangunan. Manajemen keuangan pembangunan adalah bidang yang sangat penting, terutama di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Penulis memahami bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, ia berupaya untuk mendalami berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran hingga evaluasi proyek, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Lebih dari sekadar akademisi, Penulis juga merupakan seorang praktisi di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) Kuliner di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengalaman langsung di lapangan ini memberikan Penulis perspektif yang unik, di mana ia dapat menghubungkan teori manajemen yang dipelajari dengan praktik nyata di dunia usaha. Dalam konteks UMKM, Penulis menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil sering kali berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi. Oleh karena itu, ia berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam usahanya, dengan harapan dapat membantu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kuliner yang dijalkannya. Penulis percaya bahwa pengembangan ekonomi lokal dan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberadaan UMKM yang sehat dan berdaya saing. Dengan semangat akademik yang tinggi dan pengalaman praktis yang berharga, Penulis berharap dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan nasional melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Ia meyakini bahwa dengan menggabungkan pengetahuan teoritis yang diperolehnya di bangku kuliah dengan pengalaman praktis di lapangan, ia dapat memberikan dampak positif yang lebih besar. Penulis berkomitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Harapannya, kontribusinya dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus belajar dan berinovasi dalam menghadapi tantangan di dunia yang terus berubah.

Dr.Herdi Wisman Jaya ,CT., S.Pd., M.H



Penulis lahir di kota Pagaralam Sumatera Selatan pada tanggal, 10 Agustus 1982, meraih gelar Sarjana Pendidikan S1 bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang di tahun 2014, dan menempuh Program Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Pamulang di tahun 2016. Menempuh Program Doktoral S3 Manajemen Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor selesai tahun 2024. Saat ini aktif sebagai Dosen Universitas Pamulang dari tahun 2017-sekarang, menjadi wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK Sasmita Jaya Pamulang tahun 2021-2022, Wakil Kepala

Sekolah bidang Hubin DUDIKA dan Humas tahun 2022-2023,Wakil kepala sekolah SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang bidang Saprass tahun 2024-sekarang,Dosen Tutor Universitas Terbuka di Fakultas Phisip Ilmu Hukum dari tahun 2018-Sekarang, Asesor dan Pelatih LSP P1 Universitas Pamulang Skema Okupasi Instruktur Muda tahun 2019-Sekarang. Penulis dari beberapa media masa nasional dan Internasional, TIM Ahli FGD untuk Inobel,Anugerah Konstitusi, Guru berprestasi dan berdedikasi Kesharlindung Kemdikbud tahun 2018-2020.Penulis dapat di hubungi melalui email: herdiwismanjaya@gmail.com/dosen00989@unpam.ac.id

Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M.Si



Penulis kelahiran Jember. Pada tahun 2006 meraih Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Pada Tahun 2009, Meraih Gelar Master Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Jember. Aktif dalam penelitian yang berbasis keilmuan ilmu politik dan ilmu administrasi dengan konsentrasi kebijakan publik dan Pemerintahan Daerah. Penulis saat ini aktif dalam Riset Group “Institute maritime for studies” Universitas Jember dan menjadi Pengurus Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur. Selain itu, menjadi pengurus Organisasi Profesi yaitu Indonesian Association Public Administration (IAPA) Jawa Timur dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jember. Pemakalah di beberapa acara seminar baik internasional maupun nasional. Memiliki beberapa publikasi Jurnal Internasional dan nasional, menerbitkan beberapa buku referensi yang berjudul [Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia](#) (2019) dan [Kepemimpinan Kepala Daerah Pascapilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah](#) (2021). Pengalaman pekerjaan penulis selama ini beragam, mulai peneliti, konsultan dan dosen. Sejak tahun 2015, menjadi dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dr. Musmuliadi, S.Sos., M.Si



Penulis adalah seorang akademisi yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Otonomi Daerah. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di universitas Kutai Kartanegara dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dan melanjutkan pendidikan pascasarjana dan Program Doktor di Universitas Mulawarman Samarinda, Selain sebagai Dosen beliau diberi tugas tambahan sebagai Kepala Program Studi pada Program Pasca di Universitas Kutai Kartanegara. Sebagai seorang dosen, Dr. Musmuliadi memiliki visi untuk menciptakan generasi pemimpin yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga peka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Misinya adalah untuk mengedukasi mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Beliau berharap agar lulusan dari program pascasarjana Universitas Kutai Kartanegara dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat

Dr. Helin Garlinia Yudawisastra., S.E., M.Si



Penulis merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Bandung. Menyelesaikan program S1 dan S2 di Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran serta S3 pada program Doktor Ilmu Manajemen. Bidang keahlian adalah Entrepreneur dan sustainability business.

Wenang Hidayatulloh, S.P. M.M



Penulis adalah seorang profesional di bidang manajemen dengan latar belakang pendidikan S1 Agribisnis dari Universitas Brawijaya dan S2 Manajemen dari Universitas Pancasila. Penulis memiliki pengalaman dalam dunia pengabdian ke masyarakat, pengembangan UMKM, pendidikan dan penulisan, ia

pernah terlibat dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Kiarasari Kabupaten Bogor. Selain aktif dalam dunia akademik dan profesional, Penulis juga memiliki minat besar dalam pengembangan diri, kepenulisan, serta berbagi inspirasi melalui tulisan-tulisannya. Ia percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif dan membawa dampak positif bagi pembacanya. Dengan semangat belajar tanpa henti, Penulis terus mengasah keterampilan di bidang manajemen sembari membangun jaringan profesional untuk memperluas kontribusi di berbagai bidang.

MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Manajemen Administrasi Pembangunan merupakan kajian komprehensif yang membahas berbagai aspek strategis dan teknis dalam proses pembangunan nasional. Buku ini menguraikan pentingnya pemahaman mendalam mengenai administrasi pembangunan, termasuk sejarah, tujuan, serta konteks pelaksanaannya di Indonesia. Disorot pula prinsip-prinsip dasar manajemen pembangunan yang menjadi landasan dalam menjalankan proses pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan dijabarkan sebagai proses sistematis yang memerlukan pendekatan terpadu dengan tahapan dan instrumen yang jelas, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Organisasi dan kelembagaan juga menjadi bagian penting, dengan penekanan pada koordinasi dan desain struktur yang mendukung keberhasilan pembangunan. Pengelolaan keuangan pembangunan dibahas dari sisi pembiayaan, penyusunan hingga pengawasan anggaran, mengingat keuangan sebagai elemen vital dalam pelaksanaan program. Tidak kalah penting adalah pengelolaan sumber daya manusia yang menekankan pemberdayaan dan kinerja SDM untuk mendukung setiap inisiatif pembangunan. Selain itu, pembahasan mengenai manajemen proyek memberikan wawasan teknis tentang tahapan, pengelolaan sumber daya proyek, serta evaluasi pelaksanaannya. Keterkaitan antara kebijakan publik dan administrasi pembangunan juga diulas, mengingat kebijakan menjadi kerangka utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Buku ini juga menyoroti peran teknologi dan inovasi dalam mempercepat proses administrasi, serta pentingnya pendekatan lingkungan dalam menjaga keberlanjutan. Aspek sosial dan ekonomi tak luput dibahas, menekankan pentingnya pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Terakhir, partisipasi masyarakat ditekankan sebagai kunci keberhasilan pembangunan, menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, melainkan juga oleh keterlibatan aktif masyarakat.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

0815-7000-699

Manajemen - Rp. 82.000

ISBN 978-634-246-080-1



9

786342

460801